



KEMENTERIAN KEUANGAN



PERAN APBN SEBAGAI INSTRUMEN PEREKONOMIAN INDONESIA

BUDGET GOES TO CAMPUS
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA, 21 NOVEMBER 2017





OUTLINE



TANTANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA



PERAN APBN DALAM PEREKONOMIAN



TANTANGAN PENGELOLAAN APBN



PENUTUP





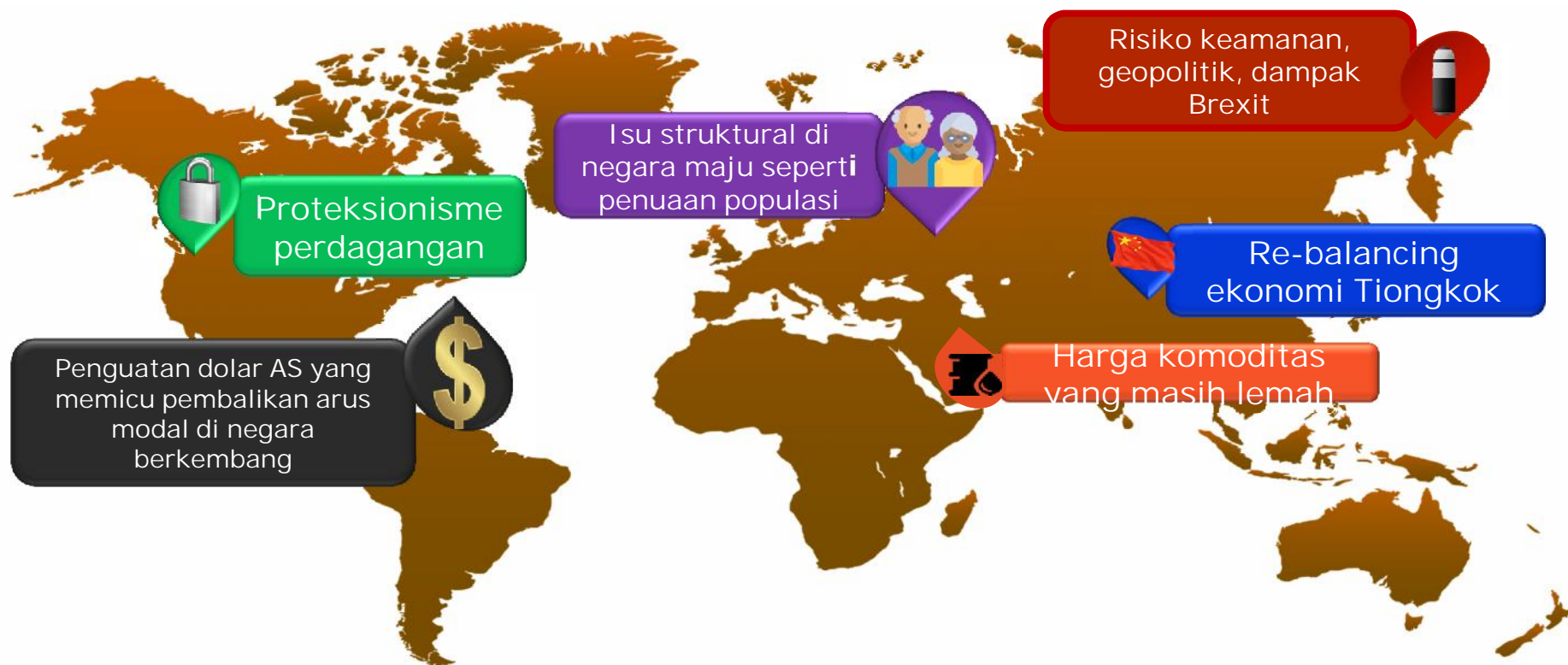
KEMENTERIAN KEUANGAN



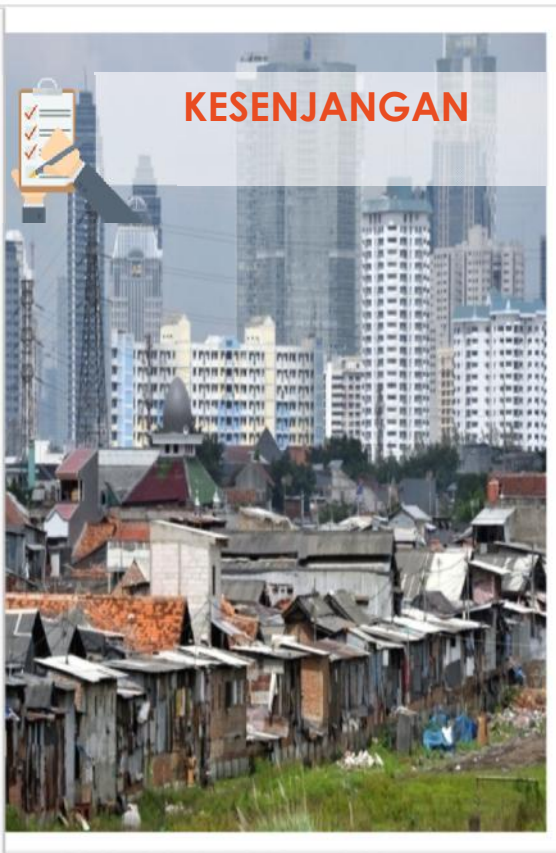
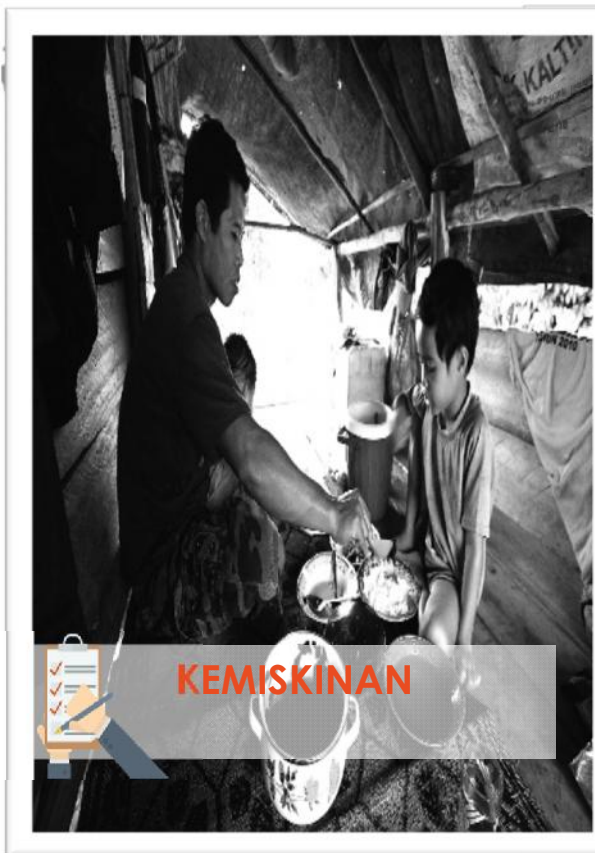
TANTANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA



Beberapa risiko masih mempengaruhi prospek ekonomi global dan perlu diwaspadai

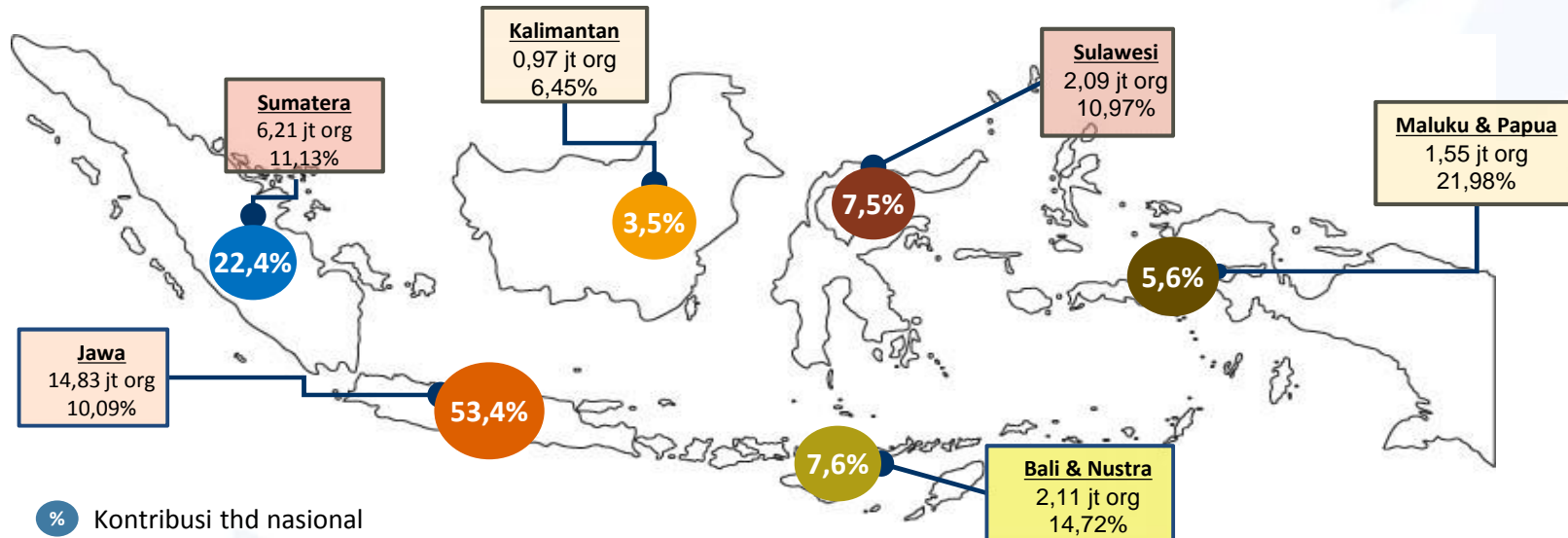


Masih Terdapat Tantangan dalam Mewujudkan Kemajuan Kesejahteraan Umum dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa...

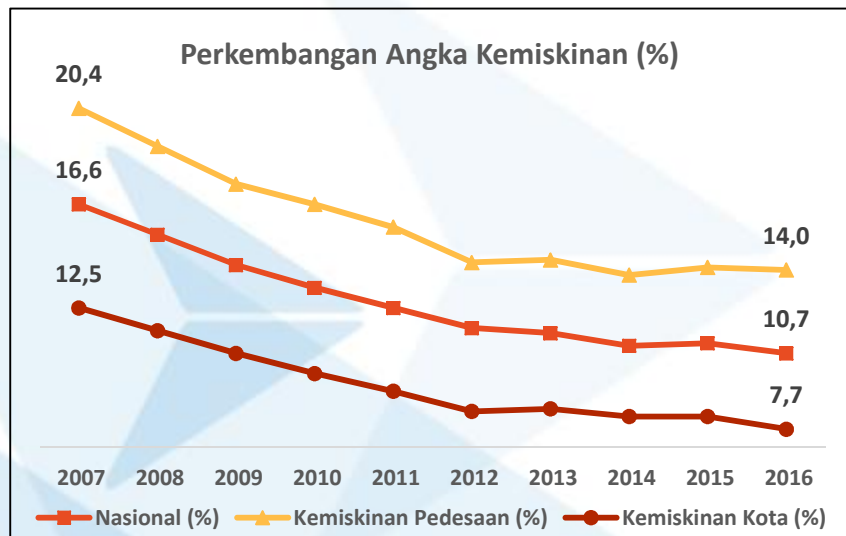


KEMISKINAN

Indikator kemiskinan mengalami perbaikan namun laju percepatan penurunan kemiskinan melambat



Angka Kemiskinan Nasional **10,7%**

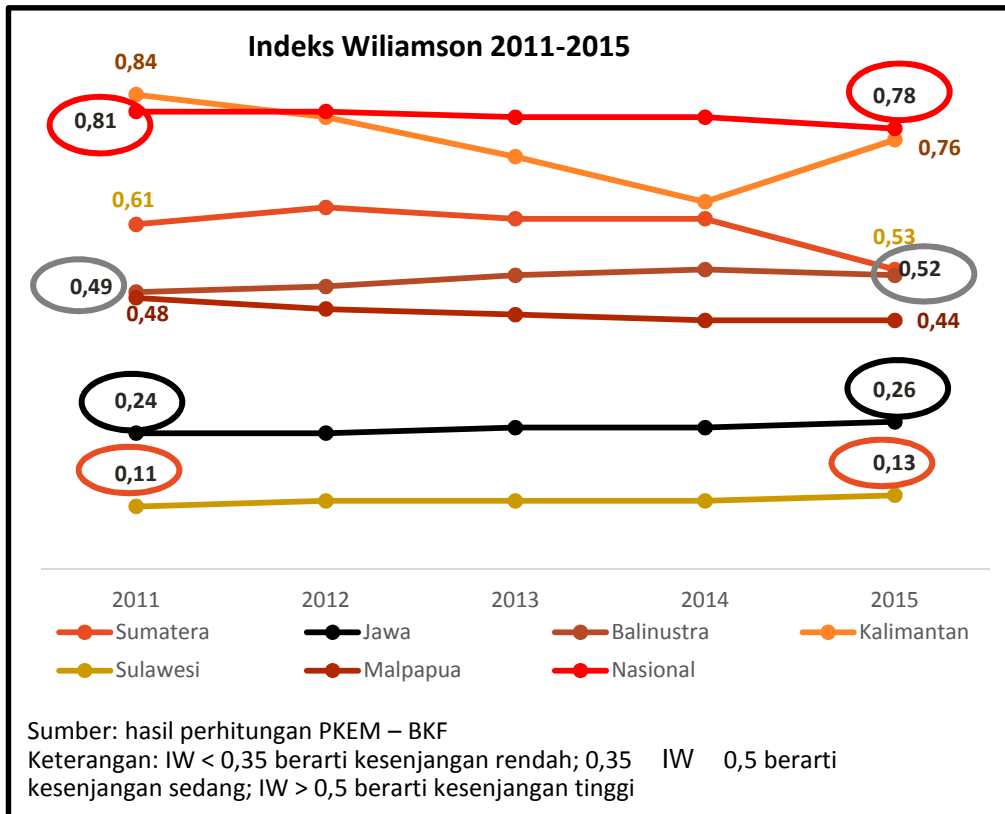
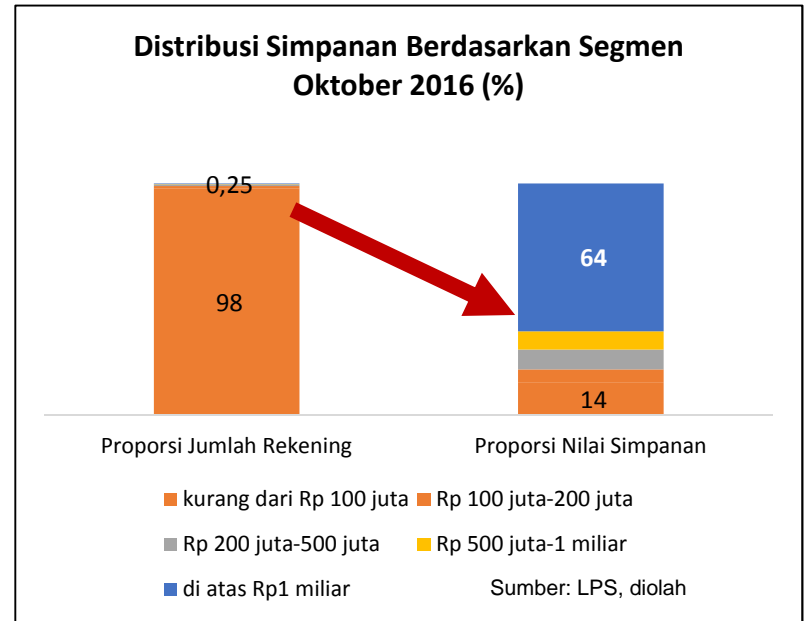
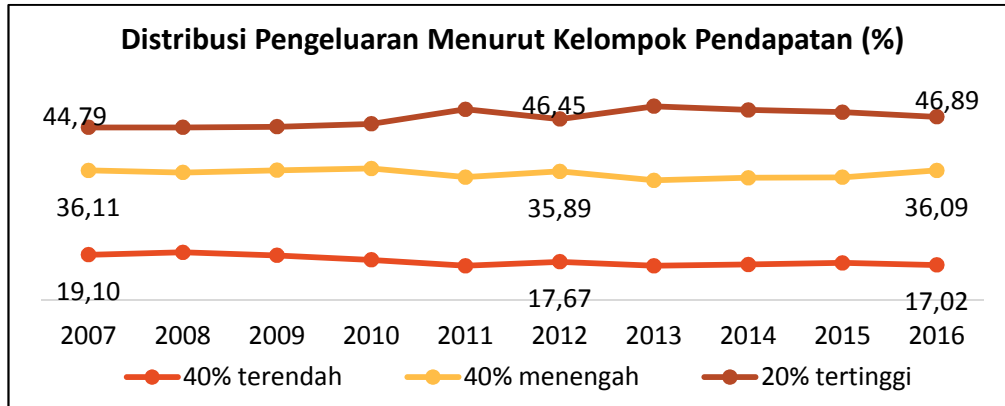


- Kantong kemiskinan masih terkonsentrasi di daerah pedesaan
- Kantong kemiskinan masih terkonsentrasi di pulau Jawa namun angka kemiskinan terbesar berada di Pulau Maluku dan Papua yaitu mencapai 21,98%.

Sumber: BPS, diolah

KESENJANGAN

Pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati merata antar kelompok pendapatan dan antar wilayah



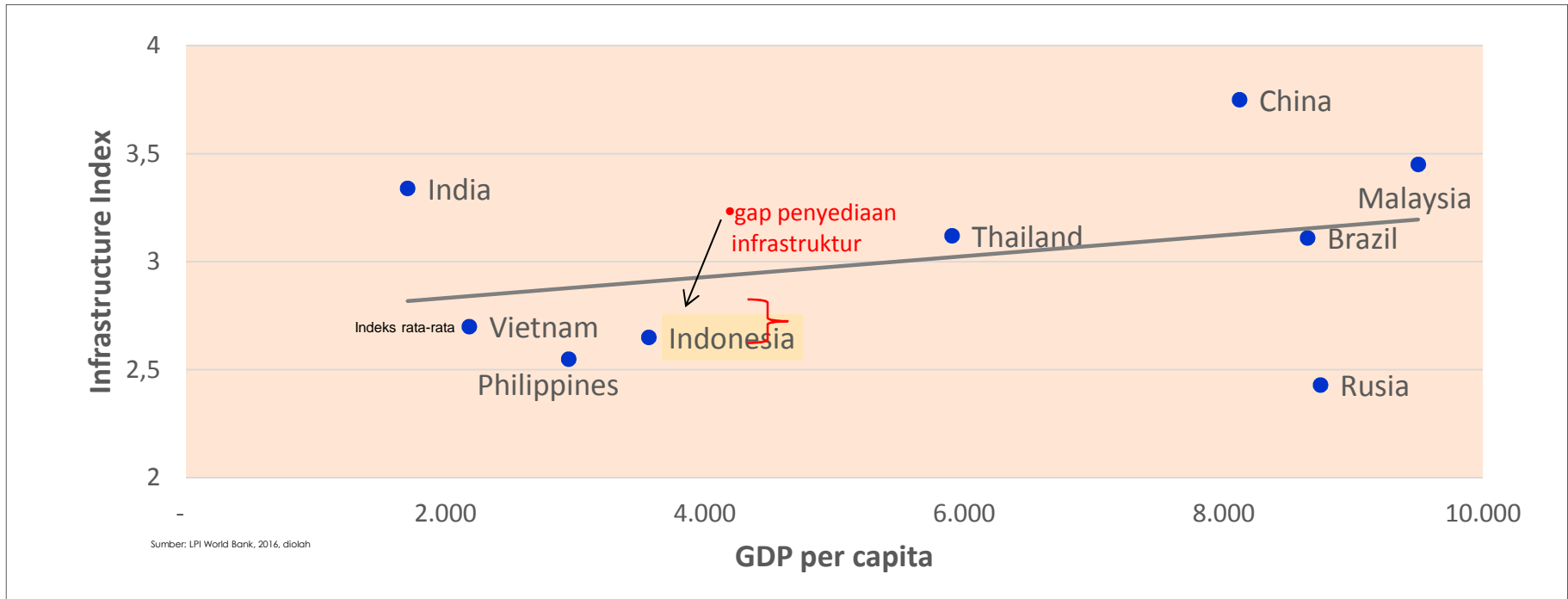
Pertumbuhan ekonomi **lebih dinikmati oleh kelompok 20% terkaya**. Pengeluaran kelompok 20% terkaya meningkat sejak tahun 2007.

Kepemilikan aset masih timpang. Jumlah rekening nasabah dengan simpanan di atas Rp 1 miliar hanya 0,25% namun menguasai simpanan di perbankan sebesar 64%.

Kesenjangan output ekonomi (PDRB/kapita) secara nasional cenderung turun dari 0,81 (2011) menjadi 0,78 (2015), tetapi di Jawa, Balinustra, dan Sulawesi cenderung naik.



Daya Saing : Penyediaan infrastruktur Indonesia masih di bawah rata-rata negara lain yang setara



- Diperlukan usaha pemerintah yang lebih besar untuk menutup gap penyediaan infrastruktur.
- Pembangunan infrastruktur perlu diakselerasi untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Daya Saing : Kualitas SDM masih perlu ditingkatkan

HDI dan PISA Score Indonesia 2015

- **69,55** IPM
- **70,9 tahun** Angka Harapan Hidup saat Lahir
- **7,95 tahun** Rata-rata Lama Sekolah
- **12,72 tahun** Harapan Lama Sekolah
- **Rp 10.420.000** Pengeluaran per Kapita per tahun yang Disesuaikan

Tren IPM Indonesia

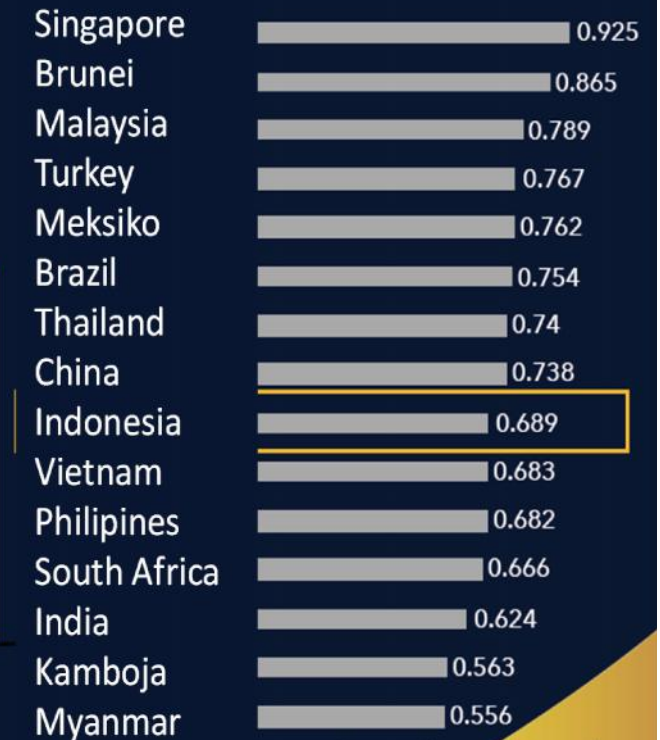
sumber : BPS



walaupun **meningkat**, Indonesia **masih tertinggal** baik dalam hal harapan hidup, pendidikan dan pembangunan manusia secara umum.

Human Development Index 2015

sumber : UNDP

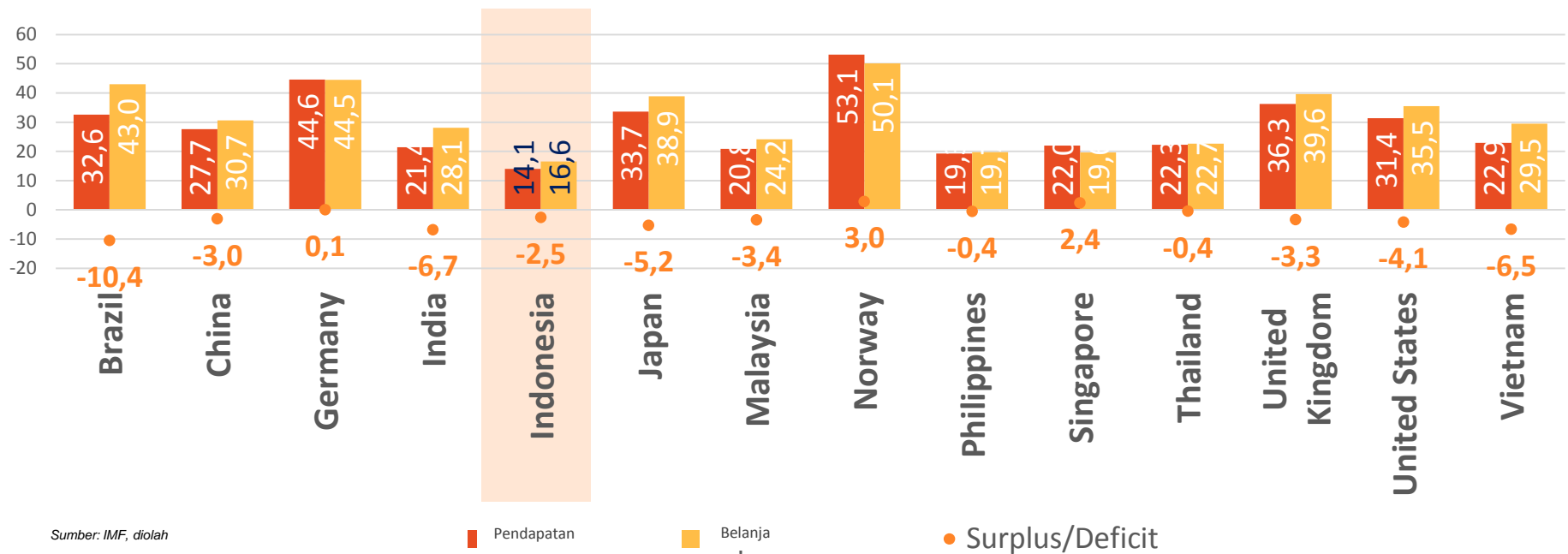




Ruang Fiskal Masih Dibatasi Oleh Pendapatan (perpajakan dan non Pajak)

Tingkat Pendapatan dan Belanja Indonesia Lebih Rendah Dibanding Negara Lain

Posisi Fiskal Negara – Negara 2016 (general government, % of GDP)





PERAN APBN DALAM PEREKONOMIAN



Diperlukan Sinergi Antar Kebijakan Untuk Menghadapi Tantangan Domestik & Global

EKONOMI YANG INKLUSIF



APBN MERUPAKAN INSTRUMEN FISKAL NEGARA

APBN berguna dalam :



**Mendorong
Pertumbuhan
Ekonomi**



**Menjalankan
Program
Kesejahteraan
Rakyat**



**Desentralisasi
Fiskal**



**Mengelola
Hutang Negara**



**Peningkatan
Investasi**

APBN Mendukung Fungsi Pemerintah

APBN merupakan:

- ❖ rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- ❖ wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang



Fungsi Otorisasi

dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja tahun bersangkutan.



Fungsi Perencanaan

Pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.



Fungsi Pengawasan

Pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.



Fungsi Alokasi

Anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.



Fungsi Distribusi

Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



Fungsi Stabilisasi

Alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.



APBN Mengatasi Permasalahan Kemiskinan & Kesenjangan Melalui Intervensi Langsung maupun Tidak Langsung

Intervensi Langsung APBN



Kebijakan **Perpajakan** yang **berkeadilan**



Pendanaan Pembangunan Redistribusi pendapatan



Infrastruktur dasar dan produktif



Belanja berkualitas, tepat sasaran, efisien



Perlindungan sosial, transfer

Pengembangan usaha rakyat

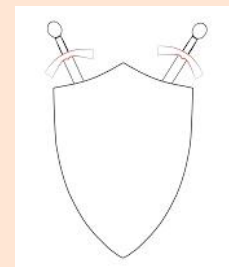
Intervensi Tidak Langsung APBN



Sebagai jangkar untuk menjaga stabilitas ekonomi



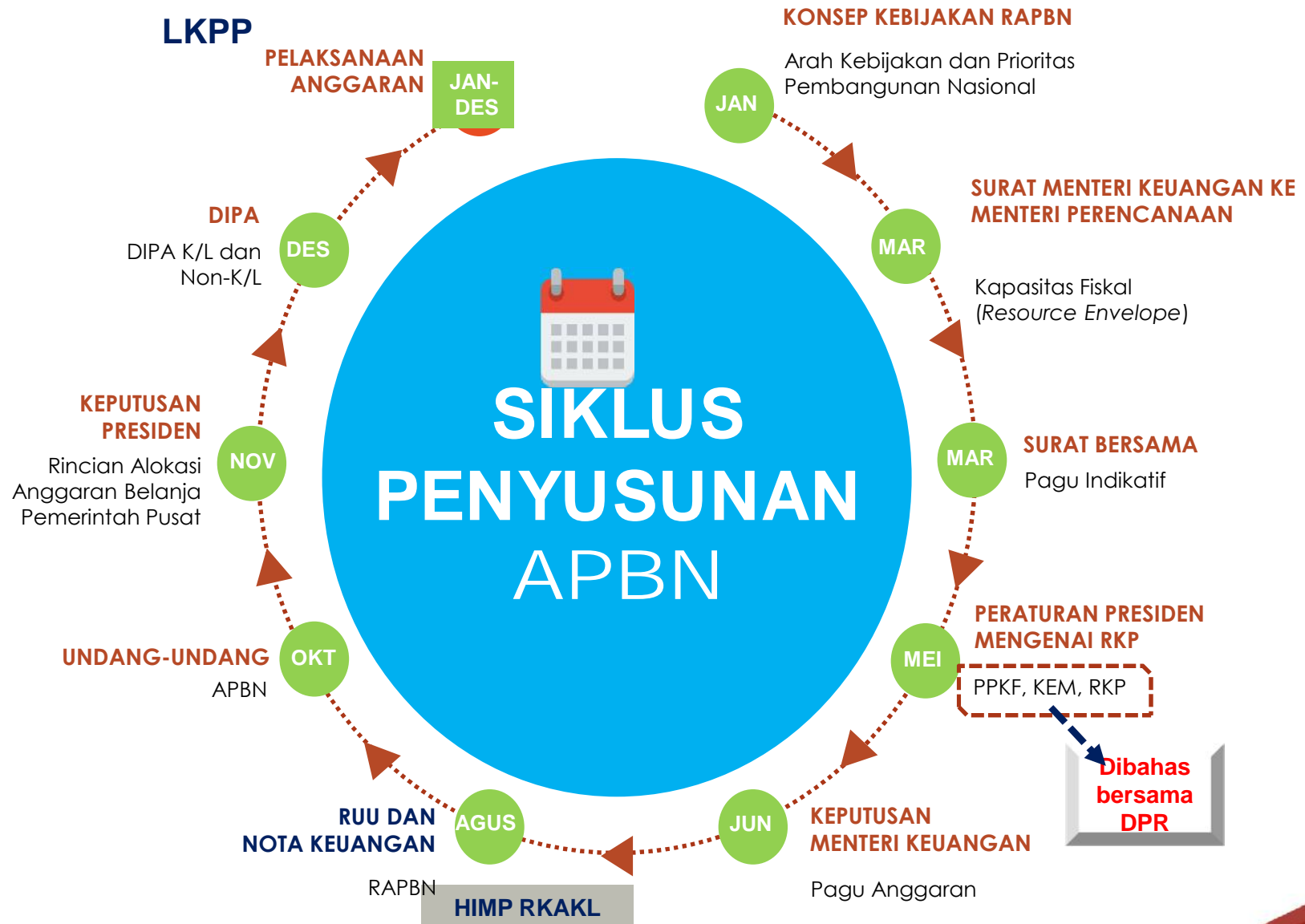
Membangun institusi yang kuat, bersih, dan kredibel



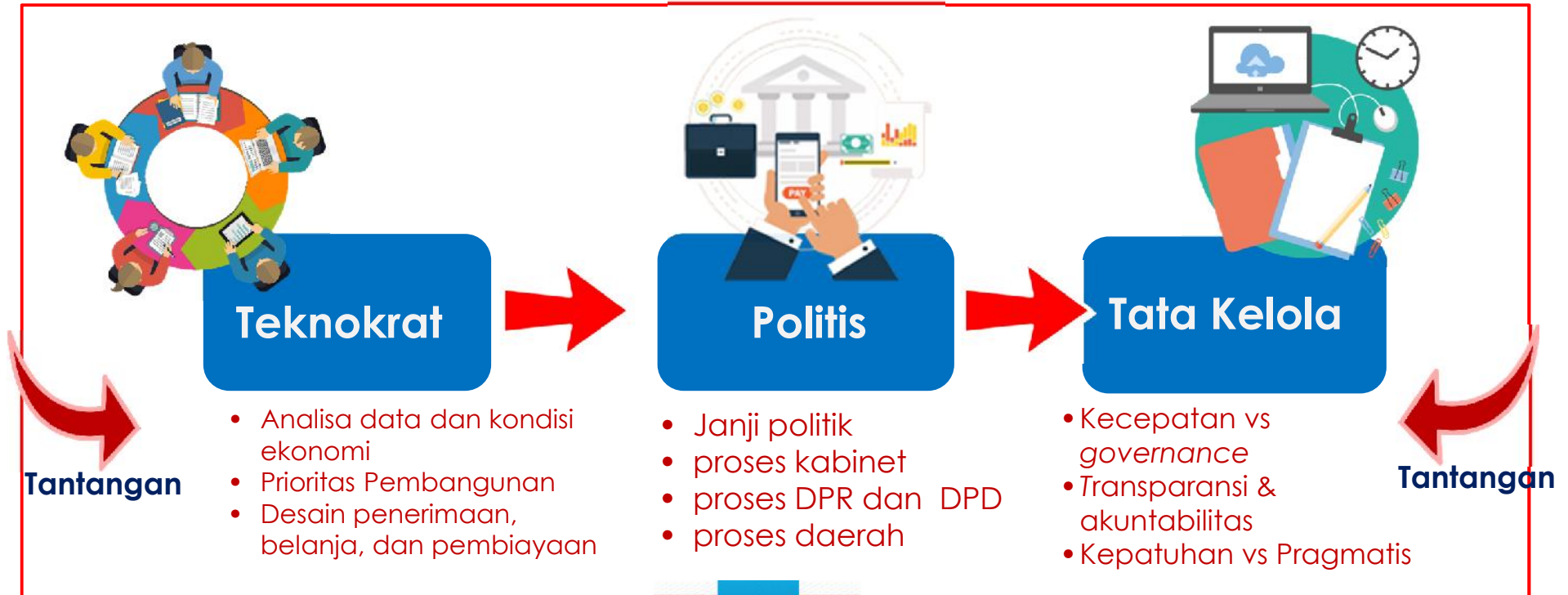
Mendukung stabilitas Keamanan



PENYUSUNAN APBN MERUPAKAN PROSES TEKNOKRATIS DAN POLITIS



Sinergi Proses Penyusunan APBN Melibatkan Semua Pihak



FUNGSI ALOKASI, DISTRIBUSI, DAN STABILISASI

KESEJAHTERAAN RAKYAT



TANTANGAN PENGELOLAAN APBN



TANTANGAN PENGELOLAAN APBN



Ruang Fiskal Terbatas

- Masih ada potensi perpajakan
- Harga minyak rendah dan Lifting minyak stagnan



Mandatory Spending dan belanja wajib relatif besar

- Mandatory spending (Pendidikan, Kesehatan, Transfer ke Daerah & Dana Desa)
- Belanja wajib (pegawai dan operasional, bunga utang, subsidi)



Kualitas Belanja yang lebih baik

- Efisiensi belanja operasional (rapat, perjalanan dinas, gedung)
- Efektivitas perencanaan belanja produktif



Penyerapan anggaran belum optimal

- Belanja K/L masih berkisar 90%-95%
- Belanja masih menumpuk pada triwulan III dan IV.

Mengelola Harmoni Postur APBN



FISCAL RULE DAN MANDATORY SPENDING DALAM PENYUSUNAN APBN



FISCAL RULE

Defisit

Maksimal **3%** (Konsolidasi APBN dan APBD) → UU 17 Tahun 2003

Outstanding Utang

60% PDB → UU 17 Tahun 2003



MANDATORY SPENDING

Anggaran Kesehatan

5% → UU 36 Tahun 2

Anggaran Pendidikan

20% APBN → UUD 1945 pasal 31 (4)

Dana Alokasi Umum

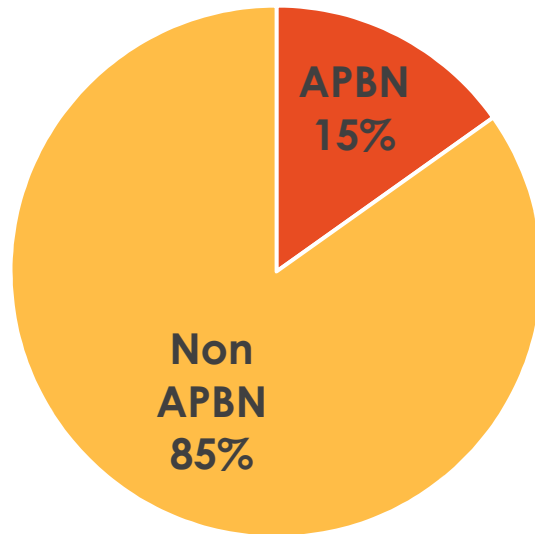
minimal **26%**
Pendapatan Dalam Negeri Netto → UU 33 Tahun 2004

Dana Desa

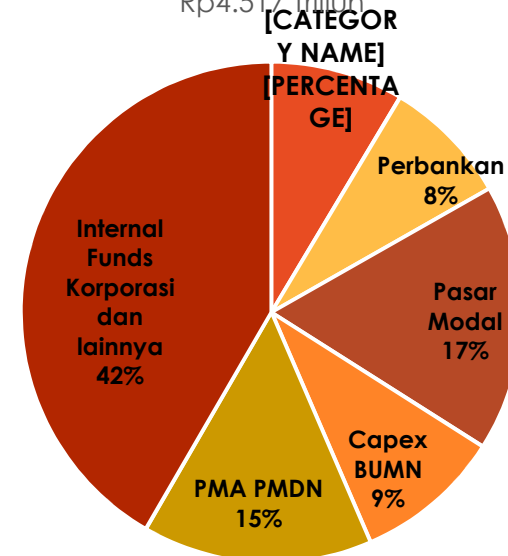
10% dari transfer ke daerah (secara bertahap) → UU Desa

Porsi Belanja Pemerintah dalam Nilai Total Perekonomian relatif kecil, sekitar 15-16 % thd PDB, termasuk untuk pembiayaan investasi

PDB Tahun 2017: Rp13.716 Triliun



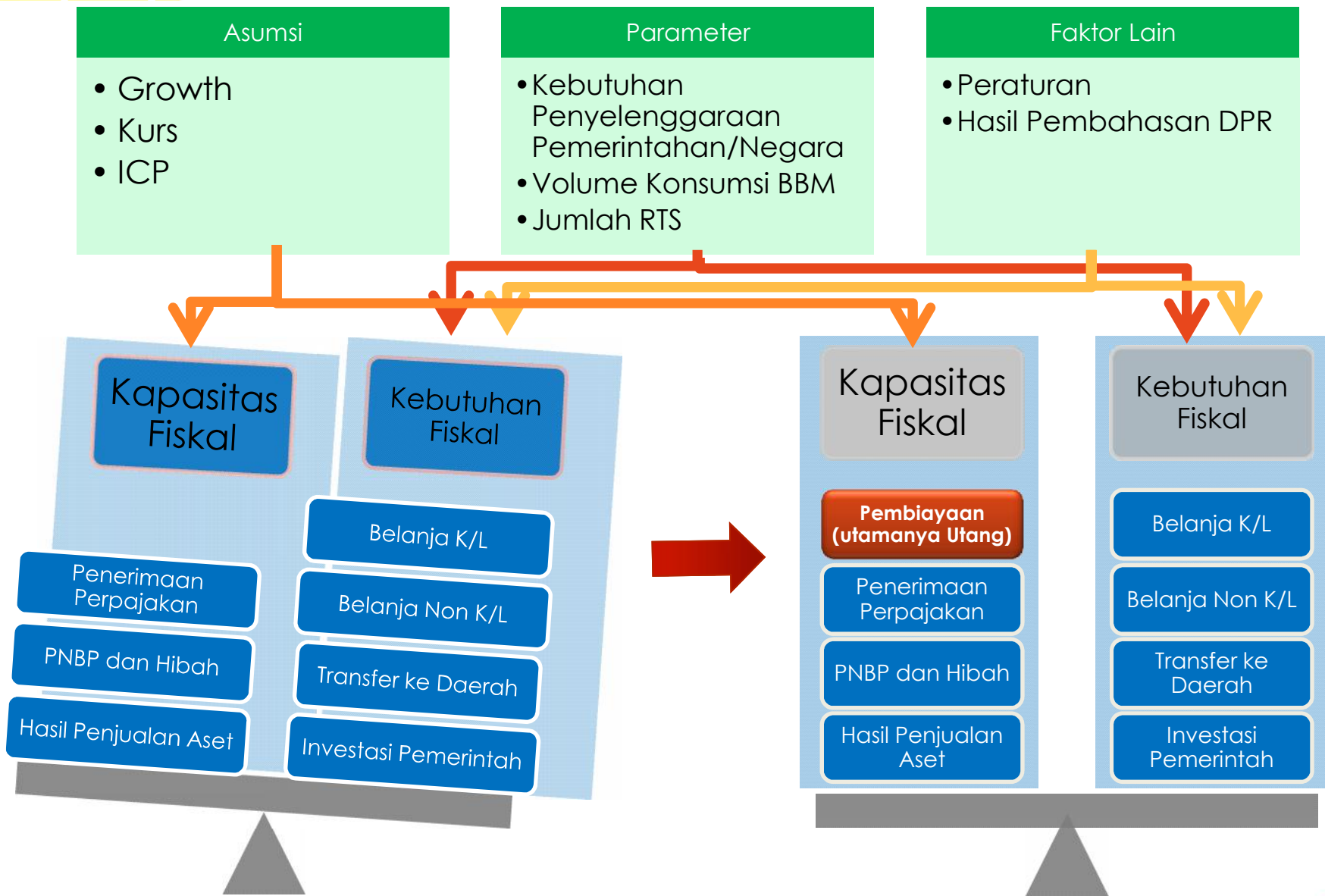
Sumber Pembiayaan Investasi 2017: + Rp4.517 Triliun



Di tengah kondisi tersebut, APBN juga:

- Berdinamika tinggi → sumber dananya tergantung pada berbagai faktor eksternal dan internal
- Menghadapi “*public goods problem*” → semua merasa memiliki tetapi sedikit yang memelihara sustainabilitasnya

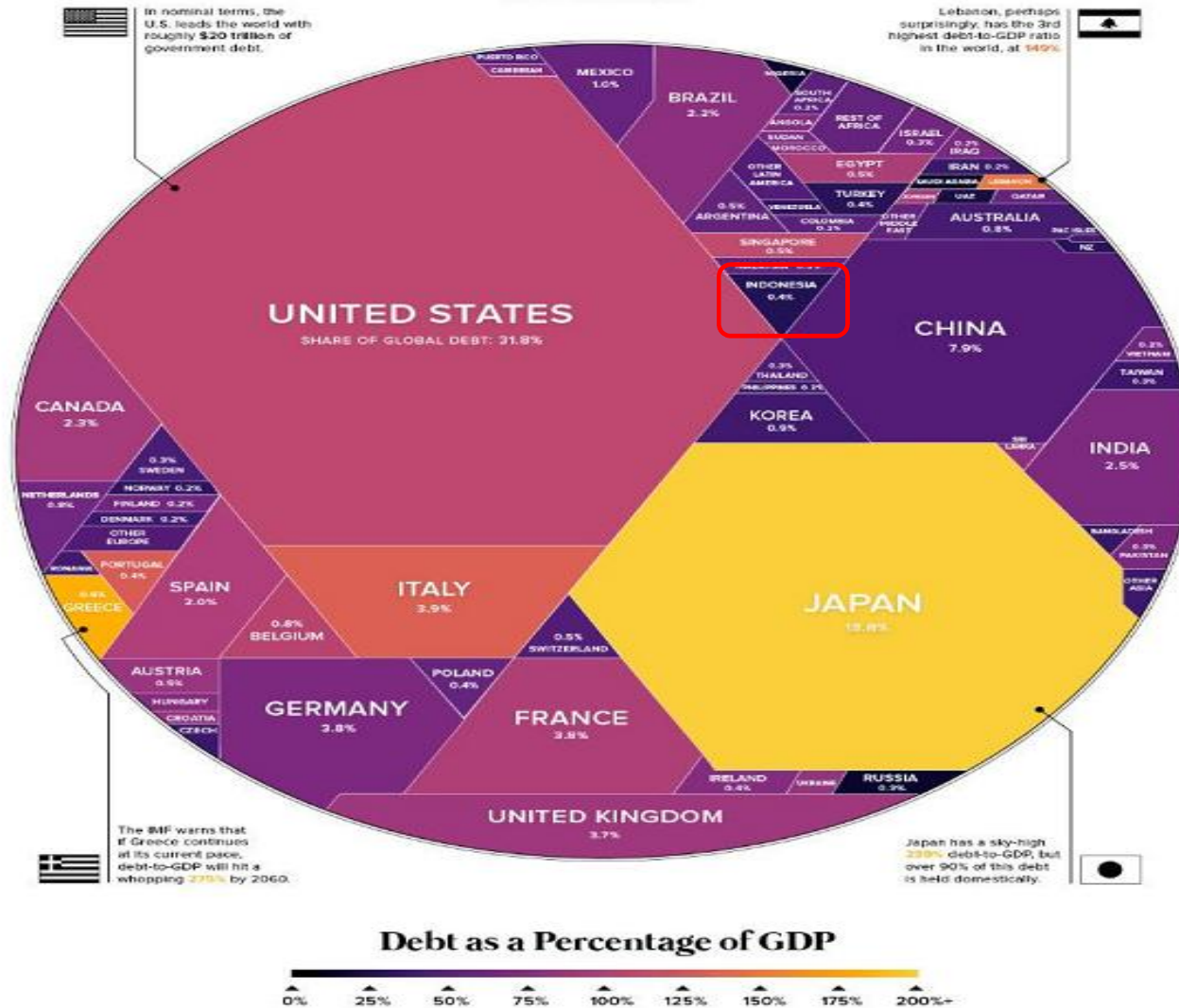
Kebutuhan Fiskal Pemerintah masih relatif tinggi dan belum sepenuhnya dapat ditutup dari Pendapatan → diperlukan Pembiayaan Utang



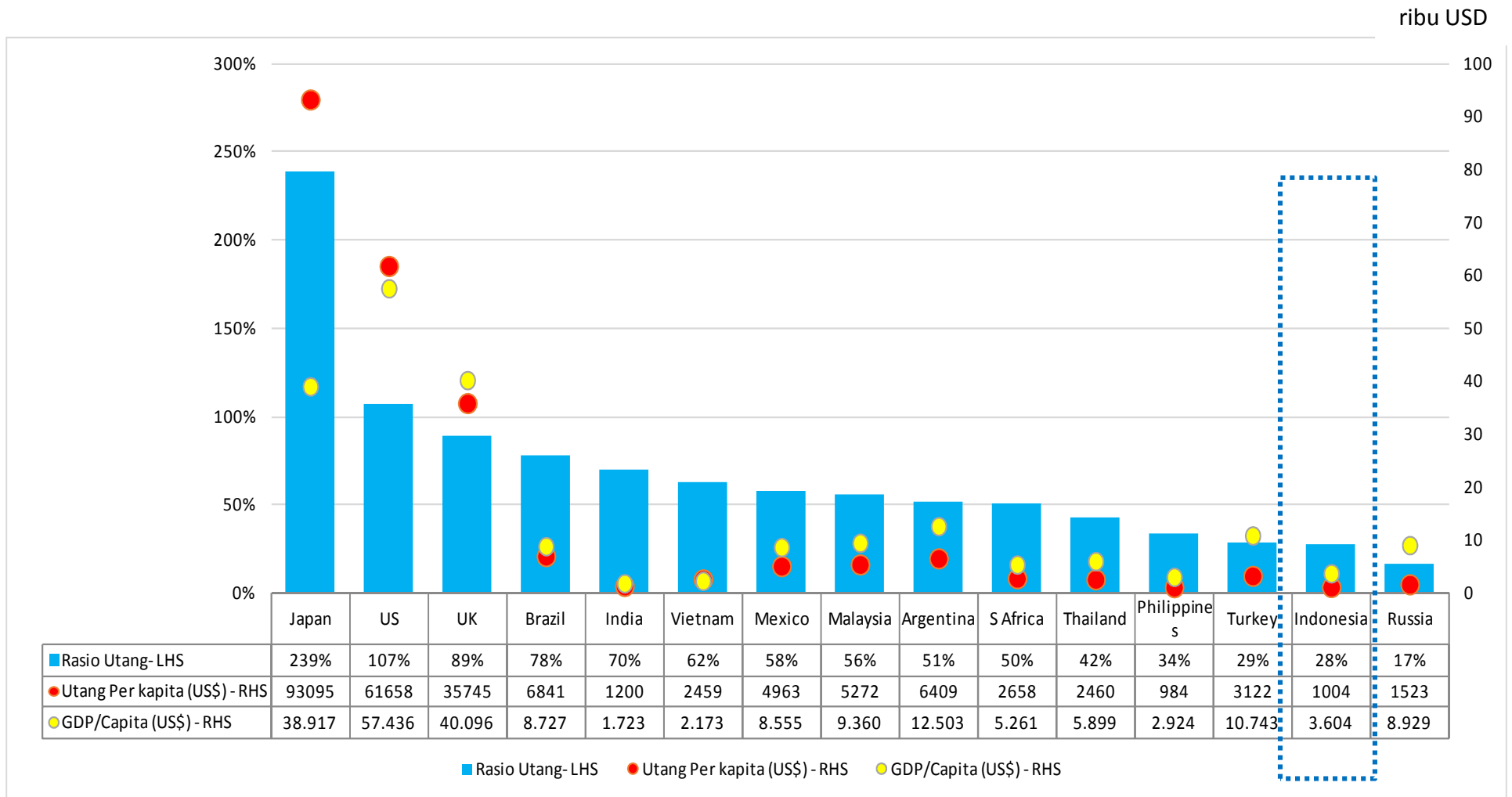


Utang Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara di dunia

Percentage of World Debt BY COUNTRY



Utang Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara di dunia



Sumber: World Economic Outlook - IMF, April 2017, diolah



KEMENTERIAN KEUANGAN



PENUTUP



INDONESIA MEMILIKI POTENSI BESAR MENJADI NEGARA MAJU

Peranan kualitas SDM sangat krusial

INDONESIA di 2045

Potensi



DEMOGRAFI

- Penduduk **309 juta** jiwa
- Usia produktif **52%**
- **75%** tinggal di kota
- **80%** kelas menengah



- Ekonomi **ke-5** terbesar di dunia
- Pendapatan per kapita **US\$29.300**
- Struktur ekonomi bergeser pada sektor bernilai tambah tinggi
- **73%** kue ekonomi berasal sektor jasa

Prasyarat



Kesiapan infrastruktur



Kesiapan teknologi



Tata ruang wilayah



Kualitas SDM



Kelembagaan Pemerintah



Sumber Daya Ekonomi & Keuangan (APBN)





Kesimpulan

- **APBN harus diarahkan** untuk mencapai tujuan bernegara, menciptakan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta menciptakan lapangan kerja
- **Kredibilitas APBN** harus terus dijaga agar sebagai instrumen fiskal mampu mendorong perekonomian dan mendapat kepercayaan publik dan pasar
- **Reformasi di bidang pajak** akan terus dilakukan dalam jangka menengah terhadap aturan perundangan dan juga administrasi perpajakan
- **Efisiensi dan peningkatan kualitas** belanja akan dilanjutkan sebagai bagian dari reformasi APBN;
- **Defisit** anggaran dalam rangka kebijakan fiskal ekspansif harus dikelola secara prudent dan ditujukan untuk kegiatan yang produktif





TERIMA KASIH

